

© 2004 Sekolah Pasca Sarjana IPB Posted 30 April 2004
Makalah Kelompok 9, Sem. 2, t.a. 2003/4
Materi Diskusi Kelas
Pengantar Falsafah Sains (PPS702)
Program Pasca Sarjana - S3
Institut Pertanian Bogor
April 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (penanggung jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr Ir Hardjanto

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MUARA ANGKE DI KEL. PLUIT PENJARINGAN JAKARTA UTARA

Disusun Oleh Kelompok 9:

Maritje A. Hilakore	: D.061030171/PTK
Jelamu Ardu Marius	: P061030091/PPN
Dasmin Sidu	: P.061030031/PPN
Insun Sangadji	: D.061030141/PTK
Bahrin	: P.061030051/PPN
Izaak T. Matitaputty	: A.161030091/EPN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 17 ribu pulau dan garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer¹. Luas wilayah laut kita, termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 5,8 kilometer persegi atau sekitar tiga per empat dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam lautan yang maha luas itu terkandung berbagai jenis sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada berjuta-juta jenis ikan, kerang-kerangan (molusca), rumput laut, udang, kepiting, hewan-hewan laut dll yang bisa menghidupi anak cucu kita. Kekayaan laut yang berlimpah itu tentu saja sangat menjanjikan kehidupan masa depan kita sebagai Bangsa secara umum terutama sebagian besar saudara kita yang bermatapencaharian sebagai Nelayan. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Thailand dengan garis pantai sepanjang 2.400 km dan luas wilayah laut yang sempit dibandingkan dengan Indonesia pada tahun 1998 mampu meraup devisa dari ekspor hasil perikanannya sebesar US\$ 4,11 milyar. Sedangkan Indonesia pada tahun yang sama hanya mampu menggaet devisa US\$ 2 milyar (FAO, 1999). Juga pada tahun yang sama nilai ekspor total produk rumput laut Indonesia hanya US\$ 75 juta, sementara Filipina yang hanya memiliki 7.000 pulau mampu mengekspor produk rumput laut sebesar US\$ 700 juta. Cina yang memiliki wilayah laut lebih kecil dari pada Indonesia telah menyumbangkan nilai ekonomi sekitar 48% dari PDB Nasionalnya dari sektor kelautan, sedangkan Indonesia baru mencapai 22 %. Dari kenyataan itu nampak bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan ini masih kurang.

Bagaimana halnya dengan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut? Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan para nelayan di Indonesia tetap melarat dan miskin. Padahal matapencaharian sebagai nelayan menempati urutan kedua setelah pertanian. Itu berarti sebagian besar rakyat kita berprofesi sebagai nelayan (di samping sebagai petani). Ketidakberdayaan nelayan-nelayan kita untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonominya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain **a)** pendidikan, pengalaman dan ketrampilan yang kurang, **b)** ketiadaan modal untuk membeli alat tangkap ikan yang jauh lebih modern, **c)** sistem penangkapan ikan tradisional yang hanya mengandalkan perahu-perahu kecil atau sampan. Keterbatasan alat tangkap ini menyebabkan mereka tidak mampu masuk ke wilayah laut yang lebih jauh dan dalam, **d)** mereka tidak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan yang memiliki modal besar dan mengoperasikan alat tangkap ikan modern dengan sistem kerja yang modern pula, **e)** belum maksimalnya intervensi pemberdayaan dari luar (dalam hal ini pemerintah atau lembaga-lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan kaum nelayan dsb.

Berbagai sebab dari kehidupan yang miskin dan melarat yang dialami oleh sebagian besar nelayan(terutama nelayan tradisional) di Indonesia di atas menyebabkan ‘*bargaining position*’ mereka sangat lemah. Para nelayan kita ‘terisolasi’ baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Secara sosial mereka tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki modal sosial yang memadai untuk bersaing dengan nelayan-nelayan kapitalis atau nelayan-nelayan yang adalah pengusaha perikanan. Kalaupun ada HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) sebagai wadah, anggotanya tidak melibatkan para nelayan kecil, tetapi nelayan-nelayan kapitalis yang memiliki modal besar dan “*bargaining position*” tinggi dengan pemerintah atau berbagai stakeholders yang lainnya. Secara ekonomis pendapatan mereka sangat kecil dan hanya mampu menghidupi keluarganya untuk sehari. Secara politik mereka tetap tertindas oleh *struktur dan sistem politik state* (negara) yang belum berorientasi pada masyarakat kalangan bawah. Partai-partai politik berlomba-lomba mengeksploitasi para nelayan ini dengan memasang berbagai atribut partai pada

¹ Terpanjang kedua setelah Kanada.

perahu/sampan mereka demi kepentingan eliti politik itu, bukan kepentingan nelayan. Politik negara belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bawah termasuk nelayan, karena terikat oleh berbagai kepentingan politik dsb. Ketidakberdayaan secara sosial, ekonomi dan politik ini menjadi ganjalan bagi nelayan-nelayan kita untuk bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudara yang lain yang secara sosial dan ekonomi telah berhasil.

Gambaran umum kehidupan para nelayan di atas juga merupakan gambaran masyarakat Nelayan di Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang menjadi 'locus' studi Pengembangan Masyarakat (CD) yang dilakukan oleh kelompok kami. Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok antara apa yang diuraikan di atas dengan kondisi kehidupan nelayan di Muara Angke. Karakteristik kehidupan nelayan di Indonesia tidak berbeda jauh satu sama yang lain. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu tidak terlalu jauh. Pada umumnya hampir sama.

Kendatipun fakta ketidakberdayaan itu merupakan gambaran umum kehidupan para nelayan kita di Indonesia, termasuk nelayan di Muara Angke yang menjadi 'setting' studi ini, namun usaha membangun dan mengembangkan rasa percaya diri dan potensi-potensi masyarakat nelayan masih harus diperjuangkan secara terus menerus. Usaha membangun dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga bangsa termasuk para nelayan baik secara sosial, ekonomi maupun sudah merupakan tujuan kita bersama. Ada tiga *domain* penting yang memiliki peranan dalam memajukan kehidupan Bangsa yakni *domain state* (pemerintah), *domain swasta* (pengusaha, lembaga-lembaga privat dll) dan *domain masyarakat*. Ketiga domain penting ini harus bersatu padu demi mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama yakni tercapainya suatu masyarakat yang makmur secara ekonomi, berkeadilan sosial dan bermartabat. Pembangunan masyarakat akan berjalan pincang apabila ketiga domain penting di atas berjalan sendiri-sendiri dan berorientasi pada kepentingannya masing-masing. Karena itu, sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud apabila *sektor pemerintah, swasta dan publik* bersama-sama memiliki komitmen yang sama, bekerja sama secara harmonis untuk mewujudkan sebuah masyarakat Bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Jika *state* (pemerintah)

mendominasi skenario pembangunan sebuah masyarakat maka ia akan menjadi *'greedy state'* (negara yang rakus) dimana peranan *domain swasta dan masyarakat* menjadi kecil. Pengalaman negara-negara yang menerapkan sistem diktator dengan menekankan *dominasi state* dan serba *'top down'* dan berujung pada kehancuran negara-bangsa menyebabkan PBB menganggap perlu merumuskan kembali arti pembangunan masyarakat yang sebenarnya.

Sejalan dengan semakin berkembangnya kehidupan demokrasi di sebagian besar negara di dunia, maka upaya *meminimalisasi peran negara(state)* dalam pembangunan masyarakat semakin kuat. Dalam konteks *demokrasi* dimana *partisipasi* dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, penghormatan terhadap martabat manusia dan HAM, tata kehidupan yang adil dan benar baik secara sosial maupun ekonomi, *pembangunan masyarakat* yang sesungguhnya lebih berorientasi pada *pemberdayaan masyarakat* itu sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat ini seluruh potensi dan sumber daya yang ada diaktifkan dan dikembangkan sehingga sebuah masyarakat bisa secara *mandiri* dan *otonom* membangun dirinya sesuai dengan kebutuhan yang dialami dan dirasakannya. Karena itulah PBB menekankan betul arti pembangunan masyarakat(*community development*) yang sebenarnya dan kepada negara-negara anggota PBB rumusan dan arti pembangunan masyarakat itu ditekankan untuk dilaksanakan secara benar dengan penuh komitmen keberpihakan kepada masyarakat. PBB merumuskan definisi pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai suatu proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan kultural, serta untuk mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memberi kesempatan yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk membantu secara penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa(Conyer, 1994).

Dari rumusan pembangunan masyarakat menurut PBB itu terlihat bahwa ketiga domain penting yang berperan dalam membangun sebuah negara-bangsa diintegrasikan secara harmonis, bukan dipisahkan. State/negara(pemerintah), sektor swasta dan publik bersinergis dan terintegrasi

dalam satu kesatuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengembangan masyarakat (CD) yang ada di Muara Angke. Apakah pengembangan masyarakat (CD) nelayan di Muara Angke sudah mampu memberdayakan masyarakat nelayan yang ada atau belum. Juga ingin diketahui bagaimana hubungan berbagai stakeholders yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan masyarakat di Muara Angke itu. Setelah membahas semua itu, kelompok kami coba memberikan salah satu solusi pengembangan masyarakat (CD) berupa menawarkan Model Pengembangan masyarakat (Community Development) khususnya nelayan di Muara Angke.

C. Konsep Pembangunan Masyarakat dalam *Community Development*

Pembangunan merupakan proses perubahan terencana untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Melalui pembangunan diniscayakan akan dapat mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tetapi dalam realitasnya pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari setengah abad belum mampu menunjukkan hasil cemerlang dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada semua strata dan bahkan pada tingkat akar rumput dinilai oleh banyak pihak telah mengalami kegagalan untuk mencapai maksud-maksud itu. Pendekatan pembangunan yang bersifat top down dan memandang masyarakat sebagai objek pembangunan diyakini merupakan salah satu factor penyebabnya. Untuk itu konsep dan pendekatan pembangunan masyarakat lahir dengan mengedepankan masyarakat sebagai subyek bukan sebagai objek. Pembangunan dipandang sebagai usaha-usaha yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam konsep pembangunan masyarakat hendaklah didasari atas dua landasan filosofi utama, yaitu landasan tata nilai (epistemology) dan kenyataan (ontology).

Pembangunan masyarakat secara epistemologis seringkali tidak berpijak pada tata nilai, norma, adat-istiadat atau budaya masyarakat yang bersangkutan dan bahkan seringkali terjadi kontradiksi. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan terlepas dari akar budaya masyarakat. Dan ini merupakan salah satu penyebab banyaknya kegagalan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dulu dan sekarang di tanah air ini dan bahkan di negara-negara berkembang lainnya. Dalam konteks ini, jika pembangunan itu dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan tersebut hanya akan dapat sustain apabila berpijak dan selaras dengan tata nilai, norma (*social capital*) yang ada. Sesuatu yang baik menurut para perencana yang berada pada semua tingkatan dalam instansi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) belum tentu baik dan cocok bagi warga masyarakat.

Di samping harus berpijak pada tata nilai, norma, adat-istiadat atau budaya, pembangunan masyarakat secara ontologis haruslah didasarkan atas realitas-realitas yang ada pada masyarakat yang bersangkutan, baik berkaitan dengan masalah social, ekonomi, budaya dan fisik lingkungan. Artinya kebijakan, program dan proyek-proyek pembangunan harus dengan cermat melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada suatu masyarakat. Tanpa kepekaan untuk melihat kenyataan-kenyataan tersebut dapat menyebabkan program dan proyek pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sesungguhnya. Oleh karenanya maka pendekatan-pendekatan pembangunan yang bersifat top down dipandang banyak mempunyai kelemahan.

Dengan demikian sudah saatnya untuk lebih memandang masyarakat sebagai subyek bukan sebagai objek dalam pembangunan. Perubahan paradigma ini sangat penting jika upaya pembangunan hendak diarahkan pada upaya pemberdayaan dan meningkatkan kemandirian pada masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan masyarakat hendaklah didasarkan atas sejumlah prinsip yang telah teruji secara empiris.

Ife (1995) mengemukakan sejumlah prinsip yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat (CD) adalah antara lain 1) **terintegrasinya** berbagai

elemen pembangunan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, personal, lingkungan dsb. Dalam pembangunan masyarakat harus ada keterpaduan dari berbagai faktor tersebut karena di antara faktor itu terkait hubungan satu sama lain; 2) **Ada pemberdayaan dan kemandirian.** Pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*”, memberi daya, memberi ‘*power*’ (kuasa)), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Segala potensi yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya.

1. Adanya pemberdayaan dan kemandirian ini melahirkan prinsip pembangunan masyarakat yang lain yakni **3) ketidaktergantungan kepada negara atau pihak luar.** Ketika ketergantungan kepada negara atau pihak lain masih mendominasi suatu pembangunan masyarakat, maka segala program dan kebijakan bersifat ‘*top down*’, sehingga tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Perencanaan program dan pelaksanaan kegiatannya kurang melibatkan partisipasi masyarakat itu karena semuanya telah dirancang dari atas (*top down*) dan bersifat *project target*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh karena itu pemahaman akan proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*) yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*). Dari tesis ini jelas bahwa kemampuan masyarakat nelayan mengambil keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap suatu proses sosial termasuk proses pemberdayaan diandaikan adanya kekuatan “*bargaining social*” yang dimiliki. Pengembangan masyarakat (CD) berorientasi pada penguatan kekuatan-kekuatan “*bargaining social*” itu sehingga masyarakat yang diberdaya itu sebesar mungkin memiliki inisiatif untuk mengambil keputusan sendiri, memiliki sifat swadaya dan kegotong-royongan, mengetahui apa yang mereka inginkan dan mengembangkan kemampuannya untuk mewujudkan apa yang

mereka inginkan itu berdasarkan program-program yang mereka rancang dan susun sendiri (*bottom up policy*).

Jika sebelumnya sebuah masyarakat tertindas secara sosial dan ekonomi mungkin karena kondisi struktural sosial politik yang ada, maka dengan *Community Development (CD)*, masyarakat diberi daya/kekuatan (diberdayakan), digerakkan partisipasinya untuk secara aktif membangun diri dan masyarakatnya. Jika pada pembangunan Nasional dengan dominasi peran negara (*state*) dan konsekwensinya semua kebijakan pembangunan lebih bersifat '*top down*', maka yang diutamakan dalam *community development* adalah peran masyarakat. Peran masyarakat itu diintegrasikan dengan semua usaha yang digerakkan oleh negara. Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama di dalam *community development* itu. Jadi semua rencana pembangunan, pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Pemerintah (*state*) berada pada posisi sebagai fasilitator. Dengan berpijak pada pemikiran itulah PBB membuat suatu definisi yang tegas mengenai *Community Development* seperti yang telah dikemukakan di atas.

Sejalan dengan tumbangya Orde baru pimpinan Soeharto pada tahun 1998 dan kemudian ruang demokrasi dan reformasi mulai bergulir sampai dengan sekarang, paradigma pembangunan mengalami pergeseran yang cukup drastis. Jika di zaman Orde Baru kekuasaan dan wewenang mengelola negara bersifat sentralistis, maka sekarang paradigma itu sudah berubah sejalan dengan desentralisasi wewenang dan desentralisasi fiskal melalui diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Penerapan UU Otda yang dimulai tanggal 1 Januari 2000 ini telah memberikan keleluasaan yang besar kepada Daerah untuk mengelola rumah tangga Daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Jiwa dari Undang-Undang Otonomi Daerah ini adalah memberikan ruang yang luas kepada Daerah untuk menggerakkan keikutsertaan dan partisipasi masyarakatnya membangun Daerah sesuai dengan kondisi Daerah tersebut. Sejumlah wewenang dilimpahkan kepada Daerah disertai dengan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU No.25 tahun 1999.

Apa relevansi dari UU ini terhadap *Community Development* (Pembangunan Masyarakat) ? Relevansinya adalah bahwa pembangunan masyarakat tidak lagi bersifat 'top down' sebagaimana dahulu kala. Dengan payung hukum ini, maka pembangunan di seluruh Daerah di Indonesia berpijak pada keikutsertaan masyarakat secara luas dan aktif untuk memberikan kontribusinya membangun Daerah baik dalam bentuk pemikiran maupun keterlibatan aktif secara fisik. Semua potensi masyarakat baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia ditumbuh kembangkan, dihidupkan dan digerakkan untuk membangun Daerahnya masing-masing. Dengan demikian akan terbangun suatu skenario pembangunan yang berasal dari rakyat, digerakkan oleh rakyat dan semua hasil pembangunan itu pun diperuntukkan bagi rakyat itu sendiri. Sehingga di sanalah akan tercipta suatu pembangunan yang merata, adil dan berorientasi pada peningkatan martabat manusia.

D. Metodologi Penulisan

1. Lokasi Studi/penelitian

Lokasi studi/penelitian dilakukan di Muara Angke², Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Muara Angke adalah salah satu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di wilayah DKI Jakarta yang dinamika sosial dan ekonominya sangat tinggi. Lalu lintas orang, barang dan jasa berlangsung secara dinamis dan alamiah sejalan dengan hukum pasar yakni adanya *supply dan demand* (penawaran dan permintaan).

2. Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan. Wawancara dilakukan secara *purposive* dengan para informan yakni orang-orang yang dianggap banyak mengetahui tentang pengembangan masyarakat di Nelayan di Muara Angke. Informan-informan itu terdiri dari Pejabat dari Dinas Perikanan Walikota Madya Jakarta Utara, Petugas

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Petugas Pengolahan Ikan Tradisional, Ketua Koperasi Perikanan Mina Jaya, pedagang ikan, para nelayan, isteri nelayan. Selain wawancara yang dilakukan secara pribadi terhadap tokoh-tokoh di atas juga dilakukan tanya jawab secara bersama dalam kesempatan pertemuan. Masing-masing informan di atas (kecuali pedagang ikan, nelayan dan isterinya) menjelaskan tugasnya dan kepada mereka kemudian diajukan berbagai pertanyaan baik pertanyaan informatif maupun konfirmasi. Wawancara tidak hanya bersifat *purposive*, tetapi juga dilakukan secara *snowball (bola salju)*, yakni mewawancarai informan lain yang ditunjuk oleh informan sebelumnya. Wawancara *snowball* dilakukan terhadap pembeli ikan, tukang ojek, pedagang kaki lima dsb. Di samping wawancara teknik pengumpulan data primer juga dilakukan melalui observasi (pengamatan). Keseluruhan proses pelelangan, penjualan ikan, kehidupan sehari-hari para nelayan dan keluarganya, hubungan sosial dan dinamika sosial, solidaritas sosial, kohesi sosial, kekerabatan diamati secara saksama. Hasil observasi itu melengkapi data primer lain, dikaji dan digabungkan dalam suatu kerangka analisa.

Untuk melengkapi data primer, berbagai data sekunder juga digali antara lain dari Dinas Perikanan Walikotamadya Jakarta Utara, Koperasi Mina Jaya dsb. Data sekunder ini berisi Laporan Kegiatan Tahunan yang terkait dengan Tempat Pendaratan Ikan di Muara Angke, Laporan Kegiatan Koperasi, berbagai Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM MUARA ANGKE

A. Kondisi Geografis

Muara Angke secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan ini berbatasan dengan Kali Angke di sebelah Barat dan Selatan, Jalan Karang Pluit di sebelah Timur, serta Laut Jawa di sebelah Utara. Lokasi Muara Angke cukup strategis dengan

² Ada enam Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kotamadya Jakarta Utara antara lain Muara

aksesibilitas yang sangat baik. Kondisi jalan beraspal dengan sarana transportasi yang memadai.

Secara fisik, kawasan Muara Angke merupakan lahan reklamasi yang sifatnya masih labil. Kawasan ini mempunyai kontur permukaan tanah datar, dengan ketinggian 0 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Geomorfologi pantai lunak sehingga menyebabkan daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air laut tinggi. Sedimen dasar laut didominasi oleh lumpur.

B. Kependudukan

Penduduk yang menempati Kawasan Muara Angke pada umumnya adalah nelayan yang bermukim di kompleks perumahan nelayan. Pada tahun 2002 nelayan yang bermukim dan bekerja di kawasan ini tercatat berjumlah lebih kurang 4.500 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata nelayan yang bekerja di kawasan Muara Angke berpendidikan rendah. Sebanyak 7,14 % nelayan berpendidikan tidak tamat SD, 50 % tamat SD, 28,57 % tamat SLTP dan 14,29 % tamat SLTA.

Penduduk Muara Angke dapat dibagi lagi menjadi 5 variasi yang berlainan yaitu **1)** pemukim/penduduk tetap. Mereka tinggal menetap di Muara Angke dan sudah terstruktur dalam sistem RW dan RT. Mereka bukan saja nelayan, tetapi juga tukang ojek, pedagang kaki lima dsb. Pada umumnya mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Jumlah mereka kurang lebih 70%; **2)** penduduk/pemukim tidak tetap/musiman adalah mereka (nelayan dan keluarganya) yang tidak tinggal menetap di Muara Angke. Mereka berpindah-pindah. Ada kalanya mereka datang dari luar DKI seperti Cirebon, Indramayu, dll. Pada umumnya mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Penduduk ini bersifat musiman. Dan di Kampung asalnya mereka juga memiliki matapencaharian lain seperti petani, pedagang dsb. Tatkala mereka menyelesaikan pekerjaan tanam menanam di Kampungnya mereka ke Muara Angke untuk menjadi buruh nelayan mengisi waktu luang (setelah selesai musim tanam). Ada yang bulanan, tiga bulanan, ataupun semesteran. Pada umumnya mereka tidak membawa keluarga. Mereka menyewa kamar-kamar kos di sekitar pantai atau di perumahan nelayan. Sebagian besar dari pemukim

musiman ini adalah buruh nelayan yang bekerja pada pengusaha perikanan yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang besar. Mereka ikut melaut untuk menangkap ikan dan memperoleh gaji harian dari majikannya. Jumlah mereka kurang lebih 15 %; **3)** Pendetang harian pada umumnya adalah konsumen pembeli ikan di tempat pelelangan. Mereka datang dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi bahkan Semarang dll. Mereka adalah para penjual ikan di pasar-pasar tradisional di Jabotabek. Mereka bukan saja penjual ikan di pasar-pasar tradisional, tetapi juga pemasok ikan, kepiting, udang dll untuk Hotel-hotel, Restaurant, Lembaga-lembaga, Rumah Sakit dsb. Mereka telah bekerja sama secara rapi dengan para pengusaha besar perikanan di Muara Angke. Mereka membeli ikan dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai puluhan juta rupiah. **4)** pendatang/pengunjung yang mau rekreasi di Muara Angke sambil menikmati konsumsi ikan-ikan segar. Mereka adalah penduduk Jabotabek yang mengisi waktu luangnya bersenang-senang di Muara Angke. Tempat-tempat penjual makanan, ikan segar dll sering dipadati oleh pengunjung seperti ini. Menurut penuturan pemilik Restoran di sana, kepadatan pengunjung mencapai puncaknya pada hari Sabtu malam, hari Minggu dan hari-hari libur. Kepenatan kehidupan Kota rupanya mendorong warga Jakarta dan sekitarnya ini menikmati angin laut di bawah tenda-tenda makanan ikan bakar, ikan goreng dsb.

C. Fasilitas Umum

Muara Angke merupakan salah satu pangkalan pendaratan ikan (PPI) di wilayah DKI Jakarta. PPI Muara Angke ini memiliki areal seluas 649.700 m² dan berada di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan (UPT PKPI). Fasilitas umum yang terdapat di Kawasan Muara Angke antara lain berupa gedung sekolah, Bank, Puskesmas, Terminal Bus dan lain-lain.

Perumahan nelayan yang terdapat di Muara Angke dengan luas lahan 60 ha. Jarak perumahan ini dari dermaga sekitar 500 meter. Sampai dengan tahun anggaran 2000 telah dibangun sarana pemukiman nelayan sebanyak 1.128 unit, yang terdiri dari: rumah lama (540 unit), bermis T. 21/60 (203 unit),

panggung T. 21/60 (38 unit), rumah susun T. 21 (80 unit), HKSN F. 18/52,5 (20 unit) dan rumah susun T. 21 (112 unit).

Rata-rata luas lantai dasar rumah susun 21 m² per unit, sedangkan luas lantai rumah sederhana 36 m² per unit. Kondisi tempat tinggal nelayan yang beraktivitas di wilayah Muara Angke terdiri dari rumah permanen sebanyak 64,29% dan semi permanen 35,71%. Kondisi lantai keramik 10%, tegel 50% dan semen 40%.

Tingkat pencemaran di TPI Muara Angke dinilai tinggi. Di masa mendatang diperkirakan tingkat pencemarannya akan semakin parah sehingga bau tak sedap akan lebih pekat, sampah akan semakin berserakan, dan air akan bertambah tercemar. Hal ini disebabkan karena sarana pemurnian sebagai limbah belum ada di TPI Muara Angke. Tampak belum ada prasarana pemurnian bau tak sedap dari kotoran manusia berupa unit pencerna biogas. Lahan pembuangan sampah belum mencukupi. Lahan yang ada luasnya hanya 140 m². Kondisi lahan tempat membuang sampah di TPI Muara Angke ini tampak kotor, tidak tertata dan menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap.

Fasilitas air bersih telah tersedia di TPI Muara Angke yaitu dari PDAM dengan instalasi 3 unit. Pasok tenaga listrik PLN ke TPI Muara Angke dapat dinilai cukup memadai dengan instalasi 50.000 unit.

Kawasan Muara Angke merupakan pusat pembinaan masyarakat nelayan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diharapkan nelayan Muara Angke berkembang menjadi nelayan lepas pantai dan samudera. Pembinaan nelayan dimaksudkan agar mereka mempunyai pola pikir sebagai masyarakat perkotaan tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai positif.

BAB III

PETA SOSIAL EKONOMI DI MUARA ANGKE DAN STAKEHOLDERS YANG TERLIBAT

A. Peta Sosial dan Ekonomi

Dilihat dari kaca mata sosiologi, peta sosial masyarakat Muara Angke merupakan sebagian dari gambaran masyarakat Jakarta pada umumnya. Yang unik secara sosiologis ialah bahwa dinamika sosial masyarakat Muara Angke berkarakteristik pantai, kenelayanan, kelautan. Hubungan sosial yang ada di masyarakat inipun berkarakteristik kelautan, kenelayanan, kepinggir pantaian dsb. Solidaritas sosial, kohesi sosial, kekerabatan didasarkan pada kepentingan yang terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari yakni sebagai nelayan. Semua hubungan sosial, ekonomi, kebudayaan, kelembagaan dsb didasarkan pada keterkaitan dengan kegiatan rutin mereka sebagai nelayan, buruh nelayan, pengusaha perikanan, pedagang kaki lima, tukang ojek, pedagang sembilan bahan pokok dan lain-lain

Dari segi sosial variasi penduduk/pemukim ini dengan sendirinya juga menunjukkan beragam strata. Penduduk/pemukim pada kategori pertama (yang menetap) pada umumnya memiliki rumah-rumah nelayan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Istimewa Jakarta dengan sistem kredit. Penduduk yang menetap ini secara kasat mata kelihatan cukup mapan. Mereka memiliki kurang lebih 3 orang anak yang sebagian besar bersekolah bahkan ada juga yang mempunyai anak-anak yang sedang Kuliah di Perguruan Tinggi atau Sarjana. Sebagian dari penduduk ini adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang memiliki Kapal Penangkap Ikan yang besar dan mempekerjakan kurang lebih 20 orang buruh nelayan harian. Kemampuan mereka menyicil kredit perumahan menunjukkan bahwa secara ekonomi mereka tergolong mampu. *Performance* (penampilan) perumahan dan perabotnya pun memperlihatkan kemampuan mereka yang cukup memadai baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka terkonsentrasi pada wilayah perumahan yang rapi, dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air yang memadai. Secara sosiologis mereka adalah orang-orang yang cukup mampu.

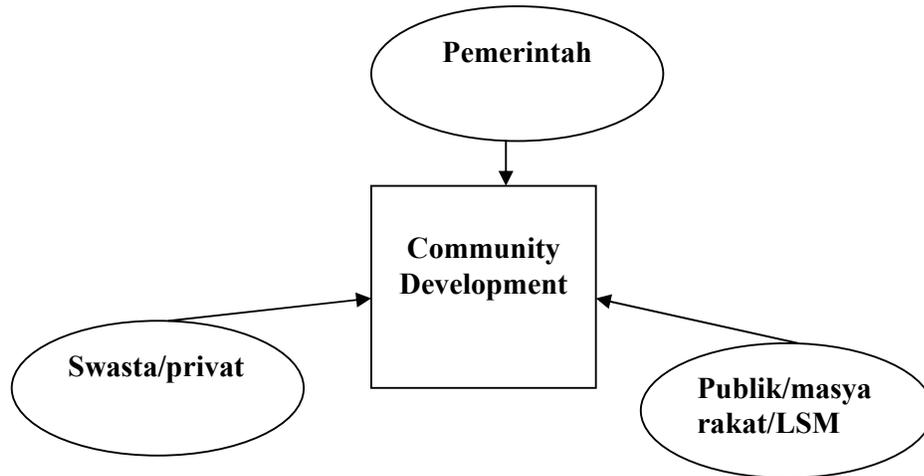
Penduduk/pemukim musiman yang datang dari daerah-daerah menunjukkan *performance* yang sebaliknya. Mereka pada umumnya terkonsentrasi pada daerah pinggiran pantai. Mereka mendirikan rumah-rumah darurat yang sangat sederhana dengan fasilitas seadanya. Dalam sebuah rumah dengan ukuran kira-kira 4 kali 5 meter berjejal kurang lebih 15-20 orang. Suatu

suasana dan kondisi perumahan yang tidak sehat dan rentan terhadap terjadinya permasalahan sosial seperti konflik antar pribadi, perselingkungan atau pelacuran dll. Di tempat atau rumah yang kecil ini mereka tidak saja menjadikannya tempat untuk beristirahat tetapi juga digunakan untuk membuka kios-kios kecil, kios-kios makanan dll. Para buruh nelayan yang mendiami rumah-rumah liar ini ada juga yang membawa keluarga dan kebanyakan anak mereka tidak bersekolah tetapi membantu orang tuanya sebagai buruh nelayan. Ada juga yang menggunakan Perahu/Sampan sebagai tempat tinggalnya. Saat Perahu/Sampan tidak melaut, suasana rumah kelihatan di atas Perahu/Sampan itu. Di sana ada kegiatan masak memasak, anak-anak bermain dengan riangnya dsb. Kecuali penduduk kategori pertama dan kedua, ada juga penduduk/pendatang harian yang terdiri dari pembeli hasil laut. Mereka adalah konsumen yang datang dari berbagai wilayah di Jabotabek. Mereka adalah para konsumen yang memasok hasil laut untuk konsumsi perkotaan dan sebagian dari mereka adalah para pedagang dengan modal besar. Penampilan mereka sangat meyakinkan dan memperlihatkan strata sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Ada yang datang dengan menggunakan mobil pribadi, sewaan dll. Dari pengamatan di lapangan nampak bahwa mereka memiliki status sosial sebagai pedagang hasil laut. Hal yang sama berlaku pada penduduk kategori keempat yang adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati makanan ikan segar. Pada umumnya mereka adalah orang-orang Kota yang ingin menikmati rekreasi pantai dengan suguhan makanan hasil laut yang segar. Mereka adalah pendatang insidental dan biasanya datang secara berkelompok minimal 5 orang. Ada yang datang secara berombongan menggunakan mobil-mobil pribadi atau mobil sewaan. Ledakan pendatang insidental ini biasanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari libur.

B. Identifikasi Stakeholders dalam Pengembangan Masyarakat (CD)

Ada tiga elemen *stakeholders* utama dalam mendukung pengembangan masyarakat di Muara Angke dalam kaitannya dengan pemetaan secara sosiologis

dan ekonomis di atas yakni 1) *Pemerintah*, 2) *sektor swasta/privat*, dan 3) *sektor publik*.



Gambar 1. Hubungan antar Stakeholders dalam CD

a. Pemerintah

Sebagai salah satu Pangkalan Pendaratan Ikan di wilayah DKI Jakarta, Muara Angke secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan yang merupakan UPT Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta. PPI Muara Angke dalam satu hari melayani sekitar 15 kapal, yang akan membongkar hasil tangkapannya dalam sehari rata-rata mencapai 30 ton. Produksi ikan yang didaratkan di PPI Muara Angke pada tahun 2000 mencapai 12.215 ton, yang terdiri dari 77,37% berasal dari nelayan lokal dan 2,22% dari nelayan daerah seperti Tegal, Indramayu, Tuban, Pekalongan, Lampung, Labuan, Cilacap dan lain-lain dengan jumlah armada sebanyak 4.769 unit (3.227 unit kapal motor dan 1.542 unit motor tempel). Dari jumlah armada penangkapan tersebut sekitar 76,60% menggunakan armada dan 9,45% alat tangkap *gil net*, 6,23% bubu, 5,15 *purseine*, sedangkan sisanya menggunakan alat tangkap payang, jaring rampus, pancing, *muro ami* dan lain-lain. Kurun

waktu terakhir dari tahun 1995-2000 produksi mengalami pertumbuhan rata-rata 32,52% per tahun, begitu juga nilai produksi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 105,38% per tahun. Data lengkap mengenai perkembangan produksi dan nilai produksi tersebut dapat disajikan Tabel 5.32.

Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan yang Didaratkan di PPI Muara Angke Tahun 1995-2000

Tahun	Produksi		Nilai Produksi	
	(ton)	Pertumbuhan (%)	(Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan
1995	4.202,99	12,32	3.773.313,80	36,81
1996	6.742,34	60,42	6.007.660,80	59,21
1997	6.403,39	-5,02	5.660.951,95	-5,77
1998	12.747,02	99,05	28.028.635,01	395,12
2000	12.215,06	-4,17	39.669.875,16	41,53
Rata-rata	8.462,28	32,52	16.628.087,34	105,38

Sumber : Suku Dinas Perikanan Jakarta Utara 2003 dan UPT PKPI Dinas Perikanan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2000

Di Kawasan PPI Muara Angke juga terdapat sarana untuk mendapatkan kebutuhan perbekalan operasi penangkapan ikan seperti kebutuhan ransum (melalui Koperasi dan kios Perbekalan), kebutuhan garam dan es (suplier dan kios/depot), kebutuhan bahan bakar dan air bersih (SPBU dan Hidran Air) dan kebutuhan suku cadang kapal dan bahan alat penangkapan (di UPMB PPI dan kios BAPI) bagi armada penangkapan.

Pengolahan ikan adalah sutu perlakuan yang diberikan pada ikan untuk menambah jangka waktu konsumsi ikan dan menambah daya guna daripada ikan itu sendiri. Pengolahan ikan ada yang bersifat tradisional (pemindangan, pengasinan, dll). Kegiatan pengolahan ikan yang ada di PPI Muara Angke

dipusatkan di PHPT sebagai pusat pengolahan ikan tradisional. Peranan PPI Muara Angke disamping menyediakan lahan yang digunakan untuk tempat pengolahan juga penyedia bahan baku pengolahan.

Di PHPT terdapat sekitar 300 unit pengolahan ikan dengan jenis pengolahan pengasinan, pemindangan, pengasapan, pembuatan terasi dan penyamakan kulit. Persentase jenis pengolahan yang terbesar adalah jenis pengolahan pengasinan antara 80-90%. Pengolah ikan yang ada di PHPT PPI Muara Angke umumnya datang dari daerah Indramayu dan Cirebon yang telah menetapdi lokasi tersebut. Bahan baku untuk pengolahan ikan ini pada dasarnya semua jenis ikan khusus untu pengasinan biasanya didominasi ikan Pari dan Petek, hal ini karena kedua jenis ikan ini tersedia sepanjang tahun. Untuk pembuatan terasi menggunakan bahan baku udang rebon.

Pemasaran/distribusi merupakan proses berantai yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Pemasaran ikan di PPI Muara Angke khusus ikan hasil tangkapan dapat dibagi menjadi dua macam pemasaran, yaitu pemasaran untuk ikan segar pemasaran untuk ikan hasil olahan. Jika dilihat dari pendapatan untuk masing-masing penjualan ini, kedua macam produk tersebut memberikan keuntungan/pendapatan yang sama baiknya, bedanya hanya pada waktu saja.

Operasional PPI Muara Angke dikelola oleh UPT PKPI (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Pendaratan Ikan) yang di dalamnya terdapat struktur oganisasi pengelola sesuai dengan SK Gubernur DKI Nomor 184 tahun 1982. Struktur organisasi tersebut terdiri dari Kepala Pengelola, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Fasilitas Pendaratan Ikan, Seksi Pelelangan, Seksi Pemukiman, dan jabatan fungsional.

Selain UPT PKPI dan pelaku usaha (nelayan, pedagang, dan pengolah hasil perikanan), terdapat lembaga lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Muara Angke. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: UPT Unit Peyuluhan Modernisasi Bertahap (UPMB) PPI, Koperasi Perikanan Mina Jaya, Syahbandar, Bank dan lembaga keuangan lain, Organisasi Perhimpunan Nelayan, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan.

Keterlibatan Pemerintah dalam pengembangan masyarakat Muara Angke juga nampak dalam kebijakan Pemerintah Propinsi DKI menyiapkan fasilitas

perumahan bagi 4.500 orang nelayan. Seperti yang telah disampaikan di atas, sampai dengan tahun anggaran 2000 telah dibangun sarana pemukiman nelayan sebanyak 1.128 unit, yang terdiri dari: rumah lama (540 unit), bermis T. 21/60 (203 unit), panggung T. 21/60 (38 unit), rumah susun T. 21 (80 unit), HKSN F. 18/52,5 (20 unit) dan rumah susun T. 21 (112 unit).

Rata-rata luas lantai dasar rumah susun 21 m² per unit, sedangkan luas lantai rumah sederhana 36 m² per unit. Kondisi tempat tinggal nelayan yang beraktivitas di wilayah Muara Angke terdiri dari rumah permanen sebanyak 64,29% dan semi permanen 35,71%. Kondisi lantai keramik 10%, tegel 50% dan semen 40%.

Masalahnya adalah, apakah fasilitas perumahan yang disiapkan untuk memberdayakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan itu dinikmati oleh semua nelayan? Tidak. Dengan komposisi 50% penduduk (nelayan) hanya tamatan SD dapat dipastikan bahwa kemampuan mereka untuk menyicil angsuran kredit perumahan itu kecil. Menurut pengakuan para nelayan yang berhasil diwawancarai, besarnya kewajiban angsuran setiap bulan membuat mereka mengalihkan fasilitas perumahan itu kepada orang lain. Dengan pendapatan mereka yang sangat kecil mustahil dapat membeli rumah yang disiapkan itu. Hanya nelayan-nelayan yang memiliki modal besar yang bisa membeli fasilitas perumahan itu. Sedangkan nelayan-nelayan kecil yang tidak memiliki modal dan ketrampilan tetap saja tidak memiliki rumah yang diidamkan. Bahkan menurut beberapa nelayan, fasilitas perumahan itu tidak semuanya milik nelayan. Ada juga yang bukan nelayan, tetapi menggunakan nama sanak saudara nelayan untuk mendapatkan fasilitas perumahan itu. Rumah tersebut kemudian disewakan kepada nelayan-nelayan tertentu.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga menyediakan berbagai infrastruktur pendukung dalam rangka membangun masyarakat nelayan Muara Angke. Hal ini terbukti dari disediakannya berbagai fasilitas baik untuk pendidikan, keagamaan, kesehatan, pengembangan ekonomi maupun untuk rekreasi/hiburan. Intervensi Pemerintah khususnya dalam penyediaan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana sangat penting selain pengaturan mekanisme pasar, pemasaran dan sebagainya. Domain negara dalam hal ini melaksanakan

kewajibannya yakni menyiapkan semua sarana dan prasarana guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat nelayan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Jenis dan Jumlah Fasilitas Umum di Muara Angke

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (unit)
1.	Perumahan nelayan	1.128
2.	Sekolah Dasar (SD)	3
3.	SLTP	1
4.	Madrasah Ibtidaiyah	1
5.	Tempat ibadah	3
6.	Gedung pertemuan nelayan	2
7.	Bank	1
8.	Pasar	1
9.	Puskesmas	1
10.	Gedung bioskop	1
11	Lapangan olah raga	1
12	Terminal bus	1
13	Pemadam kebakaran	1
14	Taman	1
15	Pos KP3	4
16	WC umum	2
17	SPBU	1

Sarana lain yang juga dibangun oleh Pemerintah DKI adalah **Tempat Pengolahan Ikan Tradisional**. Usaha Pengolahan Ikan Tradisional ini dilakukan oleh beberapa keluarga dan hasilnya dapat menunjang kehidupan ekonomi mereka. Dari kulit ikan pari misalnya bisa dibuat Tas, Ikat Pinggang, souvenir-souvenir dll. Pengrajin pengolahan perikanan tradisional ini biasanya hanya menyediakan bahan baku yang kemudian dibawa ke pabrik-pabrik untuk selanjutnya diproses menjadi bahan jadi seperti yang telah disebutkan tadi. Masyarakat Nelayan yang bergerak di bidang ini dibina oleh Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. Pembinaan ini bertujuan agar mereka bisa mengembangkan usahanya secara lebih baik dan berkualitas sehingga laku di pasaran.

Pemerintah Daerah DKI juga mendirikan **Tempat Pelelangan Ikan** yang sangat luas dan bisa digunakan secara leluasa oleh para nelayan. Sebagai salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Jakarta Utara, TPI Muara Angke sangat potensial dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Nelayan. Di tempat inilah setiap hari terjadi transaksi ekonomi baik dalam skala kecil maupun skala besar yang melibatkan ratusan nelayan dan konsumen. Tingginya kebutuhan masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya akan konsumsi ikan membuat tempat ini tak pernah sepi dari transaksi ekonomi dalam hal ini pelelangan ikan. Perputaran uang yang mencapai ratusan juta rupiah setiap harinya menyebabkan meningkatnya gairah kehidupan ekonomi masyarakat nelayan.

b. Sektor Swasta/Privat

Pengembangan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk mendirikan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran kegiatan di Muara Angke. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana itu juga melibatkan sektor swasta seperti kontraktor, pengusaha *real estate* dll. Prinsip kemitraan antara elemen pemerintah dan swasta ini tentu juga tidak begitu saja mengabaikan keterlibatan masyarakat umum. Semuanya terkait satu sama lain. Pembangunan perumahan misalnya. Proyek perumahan itu milik Pemerintah DKI, Pemerintah Pusat dan Departemen Kimbraswil, namun yang mengerjakannya adalah pihak swasta dengan melibatkan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat sekitar. Jadi sebetulnya tatkala kita menyebut salah satu elemen di dalam melakukan pengembangan masyarakat itu, elemen lainnya tidak mungkin diabaikan. Mungkin yang membedakannya adalah tingkatan peranan dan tanggungjawabnya saja.

Keterlibatan 'sektor swasta' dalam pengembangan masyarakat(CD) tidak saja dalam bentuk pembangunan fisik tetapi juga non fisik seperti lembaga usaha ekonomi Koperasi Perikanan 'Mina Jaya'. Sesungguhnya sektor swasta yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat itu sendiri karena Koperasi Perikanan ini lahir dari adanya inisiatif sebagian kecil orang yang kemudian membentuk sebuah Badan Hukum yang dinamakan Koperasi Perikanan Koperasi ini terdiri dari Nelayan Pemilik Alat Perikanan, Pengolah ikan,

Pemasaran Ikan serta anggota masyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan perikanan. Adanya kesadaran untuk memberdayakan segenap kemampuan guna meningkatkan kualitas kehidupan merupakan hal yang positif dalam Community Development. Tabel berikut memperlihatkan komposisi keanggotaan koperasi tersebut.

Tabel 3 Komposisi Keanggotaan

Tahun	Laki-laki	Wanita	Jumlah
2000	1.706	118	1.824
2001	1.687	86	1.733
2002	1.706	114	1.820
Juni 2003	1.719	116	1.835

Anggota Koperasi ini terbagi dalam 9 kelompok seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Komposisi Kelompok

No	Jenis kelamin.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pemilik jaring gilnet	142	10	152
2.	Pemilik jaring rampus	162	11	173
3.	Pemilik jaring kembang	109	23	132
4.	Pemilik alat lainnya	40	6	46
5.	Nelayan ABK	429	-	429
6	Bakul dan Pemasaran ikan	329	21	349
7	Pengolah Ikan	361	34	395
8	Pedagang klontong	67	11	78
9	Lain-lain	80	-	80
	Jumlah	1.719	116	1.835

Dilihat dari kiprahnya Koperasi Perikanan ini bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya yang juga merupakan tujuan dari *community development* itu sendiri. Hal ini terlihat dari program kerjanya yang dibagi dalam empat Bidang antara lain 1) Bidang Organisasi dan Manajemen, b) Bidang Usaha, c) Bidang Permodalan dan d) Bidang Kesejahteraan Sosial.

1. Bidang Organisasi dan Manajemen berfungsi untuk :

- Melaksanakan kegiatan konsolidasi organisasi termasuk registrasi anggota yang berada di Muara Angke.
- Meneruskan pembentukan kelompok2 anggota menurut usahanya dan melakukan pembinaan dan penyuluhan sehingga dapat memahami arti dan maksud berkoperasi.
- Melaksanakan lokakarya, pendidikan/pelatihan yang berkaitan dengan perikanan/koperasi.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota/nelayan melalui jaminan asuransi untuk jaminan atas resiko kerja, kesejahteraan atau meninggal dunia. Kegiatan ini bekerja sama dengan asuransi Bumiputera 1912.
- Memperhatikan tingkat upah yang layak serta memberikan jaminan hari tua bagi karyawan.
- Bekerja sama dengan STIE IBII dan Kadin Jakarta Utara guna meningkatkan Sumber Daya Manusia pengurus dan karyawan.

2. Bidang Usaha

- Mengembangkan usaha yang telah berjalan serta berekspansi pada usaha-usaha baru melalui usaha sendiri maupun melalui kemitraan dengan meningkatkan pelayanan kepada anggota terutama yang berkaitan dengan usaha anggota untuk berproduksi. Pelayanan tersebut meliputi kebutuhan garam, BBM, es balok, air bersih dan ransum serta alat perikanan.
- Meningkatkan pelayanan pengolahan tempat pendaratan ikan di Muara Angke mengingat pelelangan ikan sebagai sarana usaha strategis untuk mempersatukan anggota/nelayan.
- Mengembangkan unit usaha Simpan Pinjam Swamitra Mina I dengan memberikan pinjaman kepada anggota/nelayan dengan bunga yang sangat kompetitif sehingga dapat membantu permodalan anggota/nelayan yang membutuhkan guna pengembangan usahanya.

3. Bidang Permodalan

- Mendorong anggota agar melunasi Simpanan Pokoknya dari Rp.10.000 menjadi Rp.25.000 sesuai ketentuan.

- Menggalakkan Simpanan Wajib anggota dan simpanan lainnya untuk memperkuat modal dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan modal tsb secara efektif agar dapat dipercaya oleh anggota/nelayan.
- Untuk mengembangkan organisasi dan usaha mengupayakan adanya pinjaman dari BUMN dan dari Lembaga Keuangan lainnya guna mendukung secara aktif setiap usaha yang dikelola oleh manajemen dan selalu dievaluasi penggunaannya agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

- Bekerja sama dengan asuransi Bumiputera 1912 dalam rangka pelayanan asuransi kecelakaan anggota/nelayan, pengurus, pengawas dan karyawan.
- Meningkatkan pelayanan pembagian dana paceklik dengan pemerataan yang dinamis.
- Memberikan bantuan pendidikan bagi anak nelayan yang berprestasi dan menyantuni anak yatim dan janda para nelayan.

c. Publik atau masyarakat

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh publik di Muara Angke terkait dengan usaha-usaha ekonomi secara mandiri dan individual. Berbagai kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh masyarakat di Muara Angke terdiri dari :

i). Usaha Warung Makan/minum. Berbagai warung makan yang bertebaran di Muara Angke diusahakan oleh berbagai suku seperti Bugis dan Makasar. Kedua suku ini mendominasi warung makan dengan sistim lesehan (duduk). Dari pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pengelola diperoleh informasi bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari warung itu. Selain dikelola oleh keluarga mereka juga mengerjakan beberapa orang karyawan. Tempat-tempat makan yang strategis itu tidak pernah sepi dari pengunjung. Kedua suku ini menyewa tempat yang telah dibangun oleh Pemda DKI. Dengan penataan ruangan yang rapi dan bersih warung-warung makan ini diserbu oleh konsumen setiap harinya. Ledakan pengunjung terutama terjadi pada hari Sabtu,

Minggu dan hari Libur. Ikan-ikan segar yang disuguhkan baik dibakar atau digoreng senantiasa mengundang selera makan para pengunjung.

ii). Penjual ikan segar, kepiting, kerang-kerangan dll

Jumlahnya sangat banyak dan bersiliweran di sepanjang Muara Angke. Pengunjung bisa membeli ikan apa saja sesuai dengan selera lalu memilih salah satu warung. Keahlian dan ketrampilan mereka dalam membakar ikan segar ini menyebabkan pendapatan mereka cukup baik.

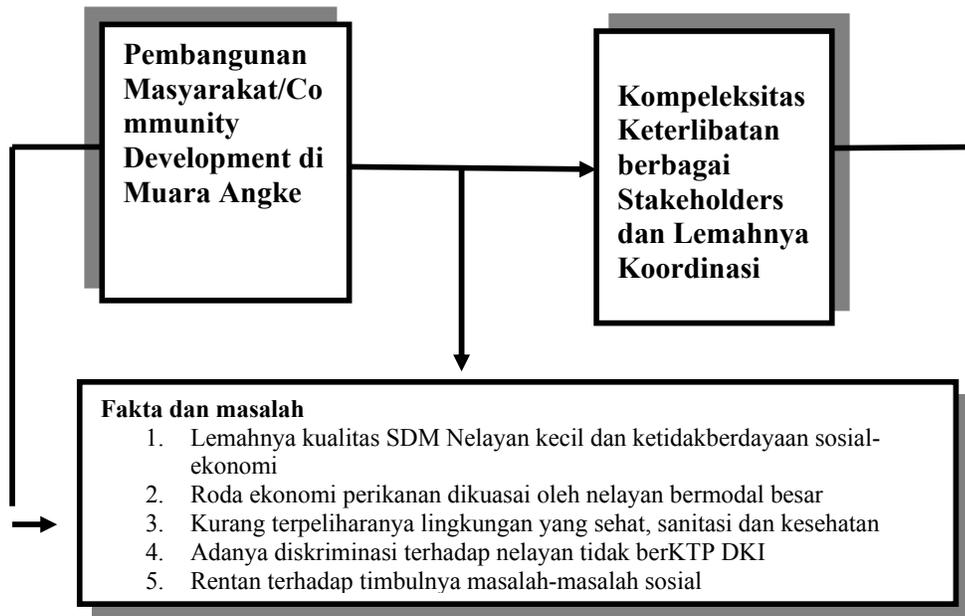
iii). Pedagang Minyak tanah, pedagang sembilan bahan kebutuhan pokok, pengusaha Wartel, Tukang Ojek, Satpam, Tukang Gerobak, Tukang Parkir dsb adalah juga stakeholders yang menentukan kelancaran pembangunan masyarakat di Muara Angke. Melalui jasa-jasa mereka, segala kebutuhan sosial, komunikasi, transportasi dapat terpenuhi Dengan ‘pembagian tugasnya’ masing-masing yang berjalan secara alamiah, dinamika sosial dan ekonomi berlangsung setiap hari.

BAB IV

MASALAH-MASALAH DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI MUARA ANGKE DAN MODEL PEMBERDAYAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF

A. Identifikasi Masalah

Dinamika kehidupan Kota besar seperti Jakarta tidak terelakkan lagi mempengaruhi semua elemen kehidupan masyarakatnya baik yang berdiam di pusat-pusat Kota dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berskala besar maupun yang berdiam di daerah-daerah periferial (pinggiran) dengan tingkatan pertumbuhan ekonomi menengah ke bawah. Sejalan dengan pertumbuhan kota dan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh warga Kota, berbagai masalah sosial perkotaanpun muncul berbarengan dengan kerasnya tuntutan kehidupan Kota besar baik secara sosial maupun ekonomi. Ekspansi ekonomi yang dominan diatur oleh negara seringkali menjadi pemicu timbulnya berbagai gejala sosial dan ekonomi yang terwujud dalam bentuk permasalahan sosial.



Gambar 2. Fakta dan Masalah

Muara Angke sebagai salah satu wilayah pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir pantai di Jakarta Utara juga mendapatkan bias dinamika perubahan dan pergeseran tata nilai sebagai akibat ekspansi ekonomi di wilayah pesisir. Keterlibatan berbagai stakeholders dalam dinamika sosial dan ekonomi nelayan di Muara Angke secara kasat mata kelihatan memberikan keuntungan sosial dan ekonomi kepada para nelayan kebanyakan. Penyediaan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana oleh negara bekerja sama dengan pihak swasta kelihatan berjalan serasi dan harmonis. Namun, jika dikritisi lebih dalam apa yang nampak secara fisik itu cukup memadai secara tersembunyi “menyimpan” berbagai masalah sosial dan ekonomi bagi nelayan kebanyakan khususnya nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Ada beberapa masalah sosial dan ekonomi yang dapat diidentifikasi dari keseluruhan pembangunan masyarakat di Muara Angke antara lain sebagai berikut :

1. *Lemahnya kualitas SDM Nelayan kecil (tradisional) dan ketidakberdayaan sosial dan ekonomi.* Lebih dari 50 % dari 4.500 nelayan di Muara Angke

berpendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan yang sangat minim ini menyebabkan mereka tidak memiliki ketrampilan yang cukup memadai untuk bersaing secara ekonomi dengan para nelayan besar terutama yang memiliki modal besar. Nelayan besar yang sesungguhnya adalah pengusaha perikanan menggerakkan roda usaha perikanannya dengan trampil, menggunakan berbagai fasilitas modern yang mahal, mempekerjakan puluhan bahkan ratusan buruh nelayan. Mereka memiliki kapal-kapal penangkap ikan yang besar, modern didukung oleh kekuatan finansial(dana) yang besar pula. Di tempat pelelangan mereka menguasai pasar karena memiliki modal besar dan fasilitas transportasi yang memadai. Jaringan pemasaran hasil laut mereka sangat luas bukan saja di dalam negeri tetapi juga keluar negeri. Mereka tidak saja menjadi pemasok ikan atau hasil laut bagi konsumen di wilayah Jabotabek, tetapi juga di luar wilayah Jabotabek dengan sistem pemasaran dan penjualan yang sudah sangat rapih. Sebaliknya, nelayan-nelayan kecil (tradisional) yang hanya mengandalkan sampan dan perahu kecil tidak bisa bersaing dengan pengusaha perikanan ini. Mereka tidak bisa menghasilkan banyak ikan sebagaimana nelayan-nelayan besar tadi karena perahu mereka tidak mampu menjangkau wilayah laut yang dalam dan jauh dari pantai yang justru mempunyai ikan. Ikan yang mereka tangkap pada umumnya kecil-kecil dan sebagian besar hasil tangkapannya digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Mereka menjual hasil tangkapannya dengan harga murah dan dengan itu mereka bisa membeli beras dan kebutuhan harian lainnya. Mereka tidak memiliki asuransi jiwa atau kecelakaan laut sebagaimana nelayan-nelayan besar yang mempunyai dana besar.

Ketidakberdayaan para nelayan kecil ini baik secara sosial maupun ekonomi menyebabkan mereka tidak memiliki “bargaining position” yang cukup. Koperasi yang katanya untuk para nelayan dalam kenyataannya tidak mengakomodir kepentingan nelayan-nelayan kecil. Mereka tidak bisa meminjam uang koperasi oleh karena hasil tangkapan mereka tidak cukup untuk mengangsur pinjaman. Pinjaman Bank lebih sulit lagi bagi mereka karena tuntutan persyaratan agunan, cicilan dan bunga yang bagi nelayan kecil sangat sulit dipenuhi. Sebaliknya bagi nelayan-nelayan besar Koperasi dan Bank

menjadi 'lahan pinjaman dana' yang sangat menguntungkan bagi mereka. Secara sosial dan ekonomi nelayan-nelayan kecil ini tetap terpuruk dan tetap hidup dalam kemiskinan.

Kondisi mereka yang serba kekurangan ini menyebabkan mereka tidak bisa membeli rumah yang ditawarkan kepada mereka. Fasilitas perumahan yang sebetulnya disediakan untuk para nelayan pada kenyataannya dinikmati oleh nelayan yang bermodal dan berpendapatan besar. Sebagian besar dari mereka membangun gubuk-gubuk liar di wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap bencana alam dan masalah-masalah sosial.

2. Roda ekonomi perikanan dikuasai oleh nelayan-nelayan pemodal

Sebagai dampak dari masalah yang pertama di atas, kesuluruhan roda ekonomi perikanan di Muara Angke dikuasai oleh nelayan-nelayan besar yang lebih cocok disebut pengusaha perikanan. Penguasaan asset-asset sumber daya (resources) baik secara sosial, ekonomi dan politik bekerja sama dengan stakeholders kunci seperti oknum-oknum pemerintah yang berpengaruh di tingkat pengambilan keputusan, perbankan, pengusaha perikanan lain, koperasi, aparat keamanan dan lain-lain menyebabkan mereka tampil sebagai pemain kunci. Tata kehidupan sosial dan ekonomi sepenuhnya berada pada sejauh mana mereka memanipulasi semua skenario pembangunan wilayah pesisir dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya.

3. Kurang terpeliharanya lingkungan, sanitasi dan kesehatan

Masalah yang juga sangat menonjol di wilayah Muara Angke adalah kurang terpeliharanya lingkungan baik yang ada di pesisir pantai, wilayah daratan, maupun wilayah laut. Sampah-sampah yang tersebar di pinggiran pantai lambat laut akan mencemari wilayah perairan yang pada gilirannya akan merusak biota laut. Demikian pun yang ada di daratan di pinggir pantai, sampah-sampah yang bertumpuk dan tidak didaur ulang menebarkan bau yang menyengat yang akan menjadi sumber penyakit dan pada saatnya mengganggu sanitasi dan kesehatan. Sistem drainase yang kurang memadai juga menimbulkan genangan air dan lumpuran yang becek dan mengganggu lalu lintas orang dan barang. Lingkungan yang tidak sehat ini pada gilirannya pula akan menyebabkan timbulnya berbagai bibit penyakit.

4. *Adanya diskriminasi terhadap nelayan-nelayan daerah yang tidak berKTP DKI*

Sebagai wilayah “bergula”, Muara Angke tidak saja menjadi lahan bagi nelayan-nelayan lokal, tetapi juga nelayan-nelayan daerah yang datang dari luar seperti Pekalongan, Jepara, Indramayu, Cilacap, Tegal, Cirebon dll. Sulitnya mengurus KTP di Jakarta menyebabkan mereka menjadi nelayan musiman yang tidak berKTP. Akibatnya, mereka sangat mudah dirasia dan diusir dari wilayah Muara Angke. Nelayan yang tidak memiliki KTP DKI ini juga mengakibatkan mereka tidak bisa ikut serta dalam keanggotaan Koperasi, pembelian rumah dengan sistim kredit dsb.

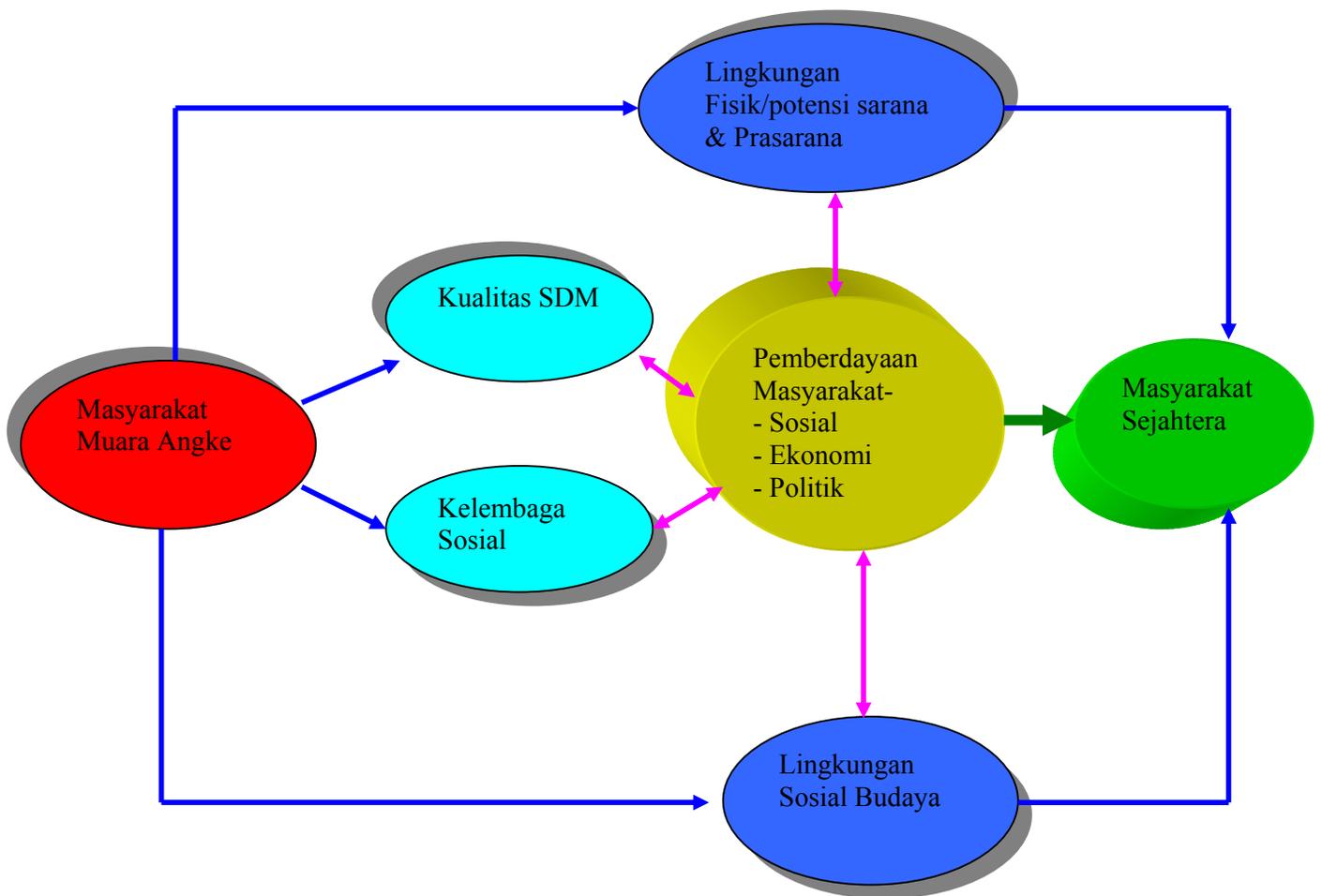
5. *Rentan terhadap timbulnya berbagai masalah sosial*

Secara sosiologis kepadatan (*density*) penduduk/pemukiman sangat rentan terhadap berbagai masalah sosial seperti konflik sosial, deviasi (penyimpangan) sosial, tindakan kriminal dsb. Muara Angke dihuni oleh berbagai macam penduduk dengan latarbelakang etnik, suku, kebudayaan dan agama berbeda. Kepadatan penduduk dengan kondisi pemukiman/perumahan yang sederhana dan berdempet-dempetan akan menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial yang jika tidak diantisipasi maka sesewaktu akan terjadi. Pembangunan masyarakat (*community development*) di Muara Angke kelihatannya belum mempertimbangkan dampak-dampak negatif dari kepadatan penduduk itu.

B. Model Pemberdayaan sebagai Solusi Alternatif

Titik tolak (*starting point*) pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri secara lokalitas dengan segala aspek kehidupannya. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kelembagaan-kelembagaan lokal, lingkungan fisik dan sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat secara lokalitas haruslah didasarkan atas aspek-aspek tersebut dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, lingkungan dan infrastruktur. Pengembangan aspek ekonomi penting artinya untuk mengembangkan lapangan kerja dan berusaha

untuk meningkatkan pendapatan. Aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama) bermakna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa (IMTAQ) serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan penting artinya untuk pelestarian sumber daya pesisir dan laut, serta perbaikan pemukiman. Aspek infrastruktur dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Kerangka konsepsi pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3 . Konsep Pemberdayaan Masyarakat Muara Angke

Ketidakberdayaan masyarakat pesisir baik secara sosial maupun ekonomi memerlukan “intervensi” dari luar (pemerintah, LSM, berbagai stakeholders dll) dengan berbasis pada komunitas lokal masyarakat pesisir itu sendiri. Upaya peningkatkan standar pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, adat istiadat dan budaya harus ditingkatkan. Bagi nelayan yang sudah tidak mungkin lagi mendapatkan pendidikan formal bisa disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan informal sehingga mereka mendapatkan pelatihan dan ketrampilan sesuai dengan profesinya. Anak-anak mereka yang masih berada pada usia sekolah harus menjadi perhatian pemberdaya (Pemerintah, LSM, pekerja sosial, lembaga sosial dsb). Identifikasi adat dan budaya dari berbagai etnik dan suku bertujuan agar bisa menciptakan perpaduan budaya yang tidak saling bertolak belakang dan mengganggu harmonisasi kehidupan sosial. Peningkatan pengetahuan agama bertujuan membentuk perilaku dan sikap (iman dan takwa). Pemerintah sebagai pemberdaya kunci khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana (pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, komunikasi, perumahan dll) mutlak diperlukan. Berbagai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir ini.

Potensi-potensi lokal kelautan dimanfaatkan seoptimal mungkin sambil menerapkan berbagai teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat pesisir. Pemerintah juga menciptakan kebijakan yang terkait dengan pemasaran, modal, lembaga perkreditan dan tata cara peminjaman yang memberikan akses yang besar kepada masyarakat pesisir bekerja sama dengan berbagai stakeholders non pemerintah. Prinsip keterpaduan yang bersifat partisipatif dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi masyarakat harus diutamakan. Jika model pemberdayaan ini dilaksanakan maka diharapkan masyarakat pesisir bisa berdaya baik secara sosial maupun ekonomi.

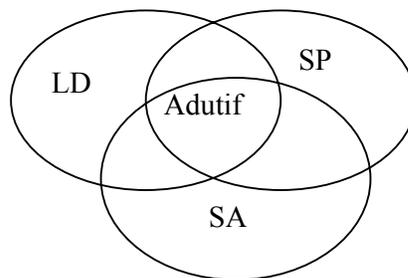
Model terpadu yang bersifat partisipatif ini disusun berdasarkan tiga model intervensi komunitas dalam pembangunan masyarakat yang dikemukakan Rothman, at.al. (1995), yaitu model: Locallity Development (LD), Social Palnning (SP) dan Social Action (SA).

Secara konseptual ketiga model tersebut dapat dipisahkan, tetapi dalam pelaksanaannya akan saling berbauran. Model locality development (LD) yang menjadi titik tolak pendekatannya adalah masyarakat secara lokalitas geografis. Model ini menggunakan pendekatan lokalitas untuk mencapai perubahan sosial ekonomi komunitas berdasarkan pandangan-pandangan dan kebutuhan-kebutuhan komunitas lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat seluas-luasnya. Pendekatan LD menekankan pada capacity building masyarakat dan mendorong masyarakat agar mampu memecahkan masalahnya sendiri.

Model social planning menggunakan pendekatan yang menekankan pada strategi perencanaan untuk pemecahan masalah-masalah sosial yang lebih kompleks yang dihadapi masyarakat. Perencanaan disusun berdasarkan data objektif. Keterlibatan pihak luar sebagai tenaga ahli sangat diperlukan.

Model social action lebih menitik beratkan pada upaya perubahan kebijaksanaan terhadap kelompok atau masyarakat marginal atau kelompok masyarakat yang kurang diuntungkan. Model ini melibatkan secara inten komunitas sasaran untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan.

Model terpadu yang bersifat partisipatif itu selanjutnya disebut sebagai Model Terpadu Partisipatif (Model Adutif). Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Terpadu Partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat

Untuk pelaksanaan model terpadu partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat hendaknya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Potensi

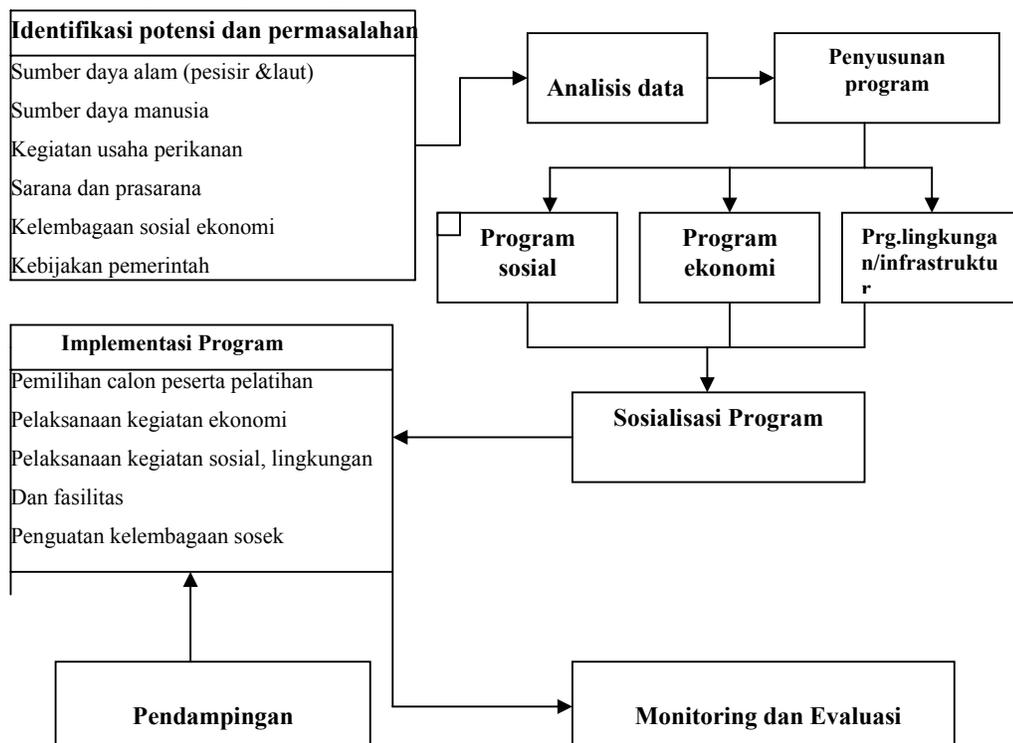
Pada tahap ini dilakukan identifikasi terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya dan keamanan. Sejalan dengan itu juga dilakukan identifikasi potensi-potensi yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Perumusan dan Pengembangan Program

Perumusan dan pengembangan program pemberdayaan ini didekati dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Partisipasi. Masyarakat sasaran (masyarakat pesisir) berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pelestarian pembangunan ekonomi, masyarakat dan wilayahnya.
- b. Kemandirian. Program ini berpijak pada kemandirian (keswadayaan) masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan wilayahnya.
- c. Kemitraan. Program tidak berjalan secara terpisah-pisah tetapi mengutamakan kemitraan antara masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kegiatan.

Model Pengembangan Program dilihat pada skema berikut:



3. Sosialisasi dan Penyempurnaan Program

Program pemberdayaan masyarakat pesisir baik secara sosial maupun ekonomi yang sudah disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi kemudian disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait yang meliputi dinas teknis, masyarakat sasaran program, tokoh masyarakat dan berbagai stakeholders (mitra) guna mendapatkan respon dan masukan untuk menyempurnakan program yang telah disusun. Mengingat kondisi sosial masyarakat pesisir yang masih terbatas seperti pendidikan, kesehatan dan perilaku maka dibutuhkan pendamping profesional yang ahli dalam bidangnya. Jadi program ini dilaksanakan dengan sistem pendampingan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

4. Prinsip Pengelolaan Program

- a. Acceptable. Pilihan kegiatan usaha ekonomi berdasarkan potensi sumber daya, kelayakan usaha serta kebutuhan/keinginan dan kemampuan masyarakat.
- b. Transparency. Pengelolaan usaha dan kegiatan dilakukan secara transparan (terbuka), diumumkan dan diketahui oleh masyarakat luas.
- c. Accountability. Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. Responsiveness. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk yang kurang berdaya (miskin).
- e. Quick disbursement. Penyampaian bantuan kepada masyarakat sasaran dilakukan secara cepat dan tepat.
- f. Democracy. Proses pemilihan peserta dan kegiatan dilakukan secara musyawarah.
- g. Sustainability. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pesisir dan berkelanjutan (berkesinambungan).
- h. Equality. Pemberian kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan.

- i. Competitiveness. Setiap ketentuan dalam pemanfaatan dana ekonomi produktif masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan jujur dalam mengajukan kegiatan usulan yang layak.

5. Pola Pengembangan Usaha dan Permodalan

Modal utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat pesisir dibagi dalam kelompok-kelompok usaha. Mereka sendiri yang menentukan jenis usahanya sesuai dengan pengalaman, pendidikan, kebiasaan dan ketrampilannya. Usaha yang didanai adalah usaha yang dapat memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut dan jenis usaha lain yang terkait. Jenis usaha antara lain usaha penangkapan, budi daya, pengolahan hasil perikanan, perdagangan produk perikanan, pengadaan bahan dan alat perikanan, BBM, es, serta pupuk dan obat-obatan. Model pengembangan usaha yang dianjurkan adalah **Model BAREV** yaitu model bagi hasil yang digabung dengan revolving atau perguliran seperti yang pernah dilakukan dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Revolving (perguliran) dilakukan setelah ada keuntungan dan usaha kelompok sudah kuat. Dana yang digulirkan bukan berasal dari dana pokok melainkan diambil dari keuntungan yang telah diperoleh kelompok. Bila ada kesepakatan dalam kelompok, modal kelompok dapat menjadi penyertaan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP) dalam Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai saham. Ada sejumlah pertimbangan maka model BAREV inilah yang cocok digunakan, antara lain

- a. Sasaran yang dibangun adalah masyarakat pesisir dan wilayahnya
- b. Tidak semua orang miskin dapat dibantu melalui kegiatan ekonomi seperti anak yatim, orang jompo dsb.
- c. Tidak semua masyarakat pesisir mempunyai minat untuk berusaha di bidang perikanan dan laut.
- d. Sumber daya laut dan pesisir tidak akan mampu menampung seluruh masyarakat pesisir untuk melakukan aktivitas ekonomi laut.

- e. Anggota saling belajar dalam wadah kelompok dan sebagai sarana mempertebal solidaritas sosial
- f. Jika ada kesulitan mereka saling belajar dan coba memecahkannya sendiri.

6. Pola Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan

Ada tiga pihak yang terlibat masing-masing

- a. Pemerintah DKI. Kelompok ini terdiri dari: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, Dinas/Subdinas Perikanan Kelautan Kotamadya, Camat, Kepala Desa/Kelurahan. Pemerintah berfungsi memfasilitasi, membina, memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan program.
- b. Konsultan. Konsultan adalah Konsultan Manajemen Kotamadya termasuk di dalamnya Tenaga Pendamping Desa yang profesional. Konsultan berfungsi membantu fungsi pemerintah. Pendamping Desa yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan kebutuhan kelompok adalah fasilitator , motivator kelompok usaha. Pendamping tinggal di tengah masyarakat. Amat baik kalau dia direkrut dari masyarakat binaannya. Dia mendampingi kelompok sejak menyusun rencana kegiatan: perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut kegiatan.
- c. Lembaga Ekonomi Masyarakat. Dalam masyarakat ada dua organisasi Kelembagaan Ekonomi yang dibentuk yakni Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) di Desa dan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP). Lembaga ini berfungsi untuk mewadahi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir serta mendukung pengembangan masyarakat dan pembangunan wilayahnya.

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Monitoring. Monitoring program pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kendala, masalah dan upaya tindak lanjut. Monitoring dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh masyarakat.

Masyarakat atau kelompok sasaran dapat melakukan pengaduan kepada pemerintah apabila ada indikasi penyimpangan di tingkat bawah.

- b. Evaluasi. Indikator kinerja dalam evaluasi program mencakup tersosialisasikannya program pemberdayaan ini kepada pihak-pihak terkait, tersalur atau tidaknya dana ekonomi produktif secara tepat waktu/tidak, tepat sasaran sesuai dengan usulan atau tidak.
- c. Pelaporan. Pelaporan dilakukan setiap bulan untuk memantau pelaksanaan program. Tingkatan pelaporan sebagai berikut. Kelompok sasaran membuat laporan bulanan tentang kegiatan usaha dan pemanfaatan dana, kendala dan masalah. Pelaporan itu disampaikan kepada Walikota/Kepala Dinas Perikanan Kelautan Kotamadya tembusan Camat dan Kepala Desa. Dinas Perikanan dan Kelautan Kotamadya merekap semua laporan kelompok sasaran dan seterusnya mengkaji, menganalisis dan melaporkannya kepada Gubernur q/q. Ka Dinas perikanan Kelautan Propinsi DKI.

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Muara Angke tidak bisa dipisahkan dari peranan *tiga domain* utama dalam pengembangan masyarakat yakni *domain negara (state)*, *domain swasta/sector privat*, dan *domain publik (masyarakat)*. Adalah fakta bahwa secara sosial dan ekonomi sebagian besar masyarakat nelayan di Muara Angke tetap hidup miskin dan melarat. Berbagai keterbatasan yang dimiliki seperti pendidikan dan ketrampilan, modal usaha, “bargaining position” membuat mereka tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kekuatan dan sumber daya yang dimiliki nelayan besar (pengusaha perikanan) baik ketrampilan, modal usaha maupun “posisi tawar menawar” membuat nelayan-nelayan kecil tidak bisa bersaing secara kompetitif.

Ketidakberdayaan ini harus menjadi alasan yang rasional dan cukup memadai untuk menjadikan mereka (nelayan-nelayan kecil) ini sebagai

kelompok sasaran pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat (*community development*). Disadari bahwa pembangunan masyarakat yang selama ini dilakukan di Muara Angke belum bisa mengangkat citra sosial para nelayan kecil ini termasuk kehidupan ekonominya. Secara sosial dan ekonomi mereka tetap terpuruk. Oleh karena itu berbagai masalah yang mereka hadapi seperti rendahnya sumber daya manusia, kehidupan yang tidak sejahtera mau tidak mau mendorong para stakeholders untuk mengkaji kembali konsep pembangunan masyarakat (*community development*) yang selama ini dilakukan di Muara Angke itu.

DAFTAR PUSTAKA

Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Budiman Arief, 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999.

Dr. Ir. Basita Ginting. Bahan Kuliah Pembangunan Masyarakat, IPB, 2003

Ary Wahyono dkk. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Kata Pengantar Dr. Ir. Rokhmin Dahuri. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2001.

Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir PEMP 2003, Jakarta, 2003.

Departemen Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 2002, Jakarta, 2002.

Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara. Laporan Tahunan 2002.

Tomas D. Andres. Community Development : A Manual. New Day Publishers Quezon City, 1988.

Rothman, J., Erlich, John L., Tropman, John E. 1995. Strategies Of Community Intervention. Columbia University Press Copyright NCSW.

Cristension, James A., Robinson, JR., Jerry, W. 1989. Community Development in Perspektive. Iowa State University Press/Ames.